



Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau

MASALAH ROKOK, MASYARAKAT SIPIL BERIKAN RAPOR MERAH

KE KABINET JOKOWI-AMIN

Jakarta, 25 November 2022 – Masuk ke penghujung tahun 2022, namun belum ada gebrakan berarti dari Kabinet Jokowi-Amin terkait masalah epidemi rokok di Indonesia. Iklan rokok masih menguasai ruang publik, harga rokok masih murah, rokok ketengan masih mudah dibeli anak-anak, bahkan ironinya rokok elektrik justru dianggap sebagai solusi masalah kecanduan rokok di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus pegiat HAM dan kesehatan publik nasional. Negara dianggap tidak hadir dalam menangani masalah epidemi rokok di tanah air.

“Tahun 2022 kembali menjadi tahun yang kelam bagi sektor kesehatan publik nasional. Tidak ada terobosan yang dilakukan Pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah rokok. Khususnya agar target penurunan angka perokok anak yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dapat tercapai. Hal ini berpotensi menjadi warisan yang buruk bagi Presiden Jokowi, mengingat praktis masa jabatan beliau tersisa kurang dari 2 tahun lagi,” Ungkap Koordinator Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau, Ifdhal Kasim.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Center of Human Development ITB AD, Roosita Meilani Dewi. Meski Kementerian Keuangan RI telah memutuskan kenaikan cukai rokok konvensional sebesar 10 persen untuk tahun 2023 dan 2024, namun angka tersebut masih jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Sesuai dengan masukan WHO, cukai rokok idealnya dinaikkan minimal 25 persen per tahun. Selain itu, kebijakan kenaikan cukai rokok jadi terasa kurang dampaknya, mengingat rokok ketengan masih mudah diakses masyarakat, khususnya anak-anak. Penjualan ketengan membuat rokok jadi semakin murah. Untuk masalah rokok ketengan ini, Kementerian Perdagangan memang terkesan lepas tangan,” Tegas Roosita.

Ada hal yang baru pada penetapan cukai tahun ini. Pemerintah RI tidak hanya menaikkan cukai rokok konvensional, melainkan cukai rokok elektrik. Cukai rokok elektrik akan dinaikkan sebesar 15 persen terhitung selama lima tahun ke depan. Menanggapi keputusan tersebut, pemerhati HAM Nasional, Asep Mulyana, menyatakan bahwa kenaikan cukai rokok tidak cukup untuk menekan prevalensi perokok elektrik di Indonesia. Berdasarkan hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, jumlah perokok elektrik meningkat hampir 10x lipat sejak tahun 2011.

“Regulasi kita masih sangat longgar terhadap rokok elektrik. Idealnya, rokok elektrik diperlakukan sama dengan rokok konvensional. Perlu ada peringatan kesehatan bergambar pada rokok elektrik, pelarangan atau minimal pembatasan iklan, promosi, dan sponsor, hingga memasukkan rokok elektrik sebagai produk yang turut diatur dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tiap Kota/Kabupaten di Indonesia,” Papar Asep.

Regulasi rokok elektrik sejatinya akan dimasukkan ke dalam poin revisi PP 109 Tahun 2012. Namun hingga kini belum ada titik terang dari proses revisi regulasi tersebut. Pada semula, untuk



Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau

mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012, Kementerian Kesehatan RI diharapkan kembali mengajukan Izin Prakarsa ke Presiden Jokowi pada tahun 2022. Wacana yang justru tidak terealisasi sampai detik ini.

“Isu rokok sepertinya memang tidak masuk ke dalam agenda prioritas utama Presiden Jokowi. Jika memang ada *deadlock* antar Kementerian/Lembaga, Presiden seharusnya mengambil inisiatif untuk melakukan Ratas Kabinet dan memimpin jalannya diskusi. Seperti ketika pemerintah RI menangani kasus Covid 19 misalnya. Jika kondisi terus seperti sekarang, jangan harap visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” Kritik Sudibyo Markus, Adviser Indonesia Institute for Social Development (IISD).

Ajang KTT G20 juga tak luput menjadi sorotan masyarakat sipil. Hal ini tidak terlepas dari masuknya PT. HM Sampoerna dan Djarum Foundation sebagai sponsor hajatan akbar negara-negara dunia. Sektor kesehatan Indonesia juga dianggap paling buruk dibanding negara G20 lain, mengingat Indonesia menjadi satu-satunya negara G20 yang belum melakukan aksesi terhadap *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*.

“Masuknya PT. HM Sampoerna dan Djarum Foundation sebagai sponsor KTT G20 menunjukkan bahwa negara tidak peka dengan masalah rumah tangganya sendiri. Lebih-lebih lagi, pemerintah RI tidak *firm* terhadap isu perlindungan hak anak dan kelompok rentan. Hal ini juga melukai semangat SDGs, di mana secara jelas menuntut komitmen negara-negara dunia untuk melakukan kontrol ketat terhadap produk tembakau atau rokok,” Tutup Rafendi Djamin, Senior Advisor Human Rights Working Group (HRWG).

#THE END



Koalisi Nasional Masyarakat Sipil **Untuk Pengendalian Tembakau**

Tentang Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau

Perkenalkan kami, **Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau (KNMSPT)** adalah organisasi yang terdiri dari para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesehatan publik yang fokus mendorong pemerintah RI untuk mengendalikan produk tembakau, seperti rokok konvensional dan rokok elektronik, yang merupakan zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.

Kontrol yang dimaksud diantaranya seputar penerapan Pelarangan Total Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok, implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong kenaikan cukai rokok secara progresif. Kontrol terhadap zat adiktif diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk peredaran produk tembakau dan tembakau alternatif.

Anggota KNMSPT

1. Rumah Mediasi Indonesia
2. Indonesia Intitute for Social
3. Human Rights Working Group
4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah
5. Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah
6. Nasyiatul Aisyiyah
7. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
8. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
9. Indonesia Corruption Watch
10. Bahrain Law Firm and Associates
11. Raya Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu sekalian dapat menghubungi **Sekretariat Koalisi (0813-8238-8134)**